



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

KONSTRUKSI

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Teknologi Konstruksi, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

17

Peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja Konstruksi
Nasional Pada Jenjang
Jabatan Ahli

20

Mengejawantahkan Spiritual Calling
Bagi ASN: Regulasi, Tantangan,
serta Implementasi Oleh Analis
Kepegawaian Muda
Badan Kepegawaian Negara

ISSN 1907-0136

9 771907 013646

Daftar Isi

Salam Redaksi

ii-iii

Penggunaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Dalam Negeri

Berita Utama

1-6

Implementasi SE Menteri PUPR No. 23/2019: 24 Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Vokasi Mengikuti Program Magang Konstruksi Di Kementerian PUPR

7-8

Prevention Through Design (PTD) Upaya Besar Untuk Mengurangi Kecelakaan Konstruksi Sejak Proses Desain/Perencanaan

9-10

Implementasi SE Menteri PUPR No. 23/2019: 24 Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Vokasi Mengikuti Program Magang Konstruksi Di Kementerian PUPR

11-12

Prevention Through Design (PTD) Upaya Besar Untuk Mengurangi Kecelakaan Konstruksi Sejak Proses Desain/Perencanaan

Berita Terkini

13-16

Pembangunan Infrastruktur Di Era Milenial

17-19

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli

Softnews

20-22

Menjawab Spiritual Calling Bagi ASN: Regulasi, Tantangan, serta Implementasi Oleh Analis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Negara

23-27

Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Sulawesi

Dewan Redaksi

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Isabella Laras Anindyo, Agus Firngadi, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika, **Desain & Tata Letak:** Ryan Wijisovia.

Alamat Redaksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.11, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Teknologi Konstruksi, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Buletin Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Edisi Ke-3 Tahun 2022 kembali hadir untuk menyebarkan informasi-informasi terkini seputar dunia konstruksi. Di edisi 3 ini bertema Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Teknologi Konstruksi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia harus diimbangi dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi di lapangan. Penggunaan teknologi konstruksi terkini juga harus dipelajari lebih mendalam guna diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang mengusung tema “Smart City”.

Beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga telah selesai menyelenggarakan kegiatan Konstruksi Indonesia 2022 yang bergabung dalam Infrastructure Connect yang terdiri dari Indonesia Infrastructure Week 2022, Konstruksi Indonesia 2022 dan Beton Indonesia 2022. Dengan tema Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa. Event tahunan Direktorat Jenderal Konstruksi ini memamerkan produk-produk dalam negeri yang diikuti oleh 80% exhibitor nasional dan 20% exhibitor internasional.

Simak juga informasi tentang salah satu strategi Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Tenaga Kerja Konstruksi melalui program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan beragam Program Pemagangan yang mempertemukan industri Jasa Konstruksi dan Dunia Pendidikan (Link and Match) yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemagangan bagi Calon TTK di Kementerian PUPR.

Dimana 24 mahasiswa perguruan tinggi program vokasi mengikuti program magang konstruksi di Kementerian PUPR. 24 Mahasiswa tersebut terdiri dari 6 mahasiswa Universitas Sriwijaya, 4 mahasiswa Universitas Lampung, 4 mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, 4 mahasiswa Universitas Bandar Lampung, 3 Universitas Jambi, dan 3 mahasiswa Universitas Batanghari Jambi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan sumber daya manusia konstruksi yang kompeten dalam bidang Building Information Modelling (BIM) dengan mengadakan pelatihan BIM dan Geospasial melalui kolaborasi dengan Tribble Navigation Singapore PTE. LTD. Building Information Modelling (BIM) bukan semata-mata aplikasi atau pengoperasian komputer, tetapi representasi digital dari karakteristik fisik dan karakter fungsional dari suatu bangunan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN, perlu dibekali dengan kompetensi di bidang BIM melalui pemodelan digital. Sebagai bahan hiburan kami suguhkan bacaan ringan tentang Pembangunan Infrastruktur di Era Milenial dan sikap masyarakat Sulawesi dalam tradisi pindah rumah yang dilakukan dengan menyerukan semangat gotong royong. Beberapa bacaan menarik yang dalam Edisi ini dapat menjadi tambahan informasi seputar dunia konstruksi Indonesia. Serta mampu memberikan dampak positif dari seluruh pembangunan infrastruktur yang telah diamanahkan kepada Kementerian PUPR untuk Masyarakat Indonesia. **SIGAP MEMBANGUN NEGERI...**

Redaksi Buletin Konstruksi menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1.) Bersifat Populer (2.) Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Konstruksi serta Informasi terkini Seputar Jasa Konstruksi (3.) Panjang tulisan/artikel Minimal 800 kata (1 halaman word) atau Maksimal 2500 kata (2 halaman word) (4.) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email: hdkp.djbk@pu.go.id dengan Subject : 'Artikel untuk Buletin Ditjen Bina Konstruksi', disertai dengan data diri berupa biografi singkat, alamat, nomor telepon, fax atau email (5.) Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis (6.) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah (editing) tanpa mengubah isi dari tulisan (7.) Tulisan yang tidak memenuhi kriteria dewan redaksi Buletin Ditjen Bina Konstruksi (8.) Dalam satu Edisi Satu Penulis hanya dapat menayangkan satu artikel.



Sumber: Dok. PUPR

Implementasi SE Menteri PUPR No. 23/2019: 24 Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Vokasi Mengikuti Program Magang Konstruksi Di Kementerian PUPR

Penulis:

Bayu Dwi Samoedra, S.T., M.A.

Kepala Seksi Pelaksanaan, Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, DJBK

Undang-Undang No. 02/2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) beserta peraturan turunannya mengamanatkan bahwa setiap Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKKK). Hal ini selaras dengan Visi & Misi Presiden RI yaitu 'Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong' di mana salah satu agenda pembangunan di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang handal & berdaya saing.

Sejalan dengan itu, dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, salah satu strategi Pembangunan Infrastruktur PUPR yaitu adanya peningkatan kompetensi SDM Tenaga Kerja

Konstruksi melalui program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan beragam Program Pemagangan yang mempertemukan industri Jasa Konstruksi dan Dunia Pendidikan (*Link and Match*) yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemagangan bagi Calon TKK di Kementerian PUPR.

Sebagai bentuk nyata dari program pemerintah tersebut, pada wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) II Palembang selama Bulan Juli hingga November 2022 dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Program VOKASI melalui *Pilot Project* Pemagangan Jasa Konstruksi. Kegiatan ini diselenggarakan pada 4 (Empat) Paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yaitu:

1. Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro Segmen Hilir & Sungai Sekanak Segmen Ilir Barat Kota Palembang oleh BBWS Sumatera VIII, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Muli dan Pantai Rajabasa) oleh BBWS Mesuji-Sekampung, Provinsi Lampung; dan
3. Preservasi Jalan Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi - Sp. Tiga Batara Gas Plant (Pematang Lumut) - Kuala Tungkal dan Jalan Dalam Kota Kuala Tungkal oleh BPJN Jambi, Provinsi Jambi.

Kegiatan percontohan (*Pilot Project*) ini diikuti oleh total peserta sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang mahasiswa Jurusan Teknik Sipil maupun Teknik Lingkungan yang merupakan utusan dari 6 (Enam) Perguruan Tinggi Mitra (Universitas Sriwijaya, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Bandar Lampung, Universitas Jambi dan Universitas Batanghari).

Lebih jauh lagi, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan teknis terkait penyempurnaan SE Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemagangan bagi Calon TKK di Kementerian PUPR sehingga dapat terapkan dengan baik di lapangan yang dilakukan dengan cara penataan tata kelola & inovasi pada proses (*process innovation*) penyelenggaraan kegiatan; dan meningkatkan peran aktif dan kolaborasi/sinergitas dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang pada akhirnya diharapkan mampu menjawab tantangan jangka panjang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran lulusan Perguruan Tinggi, yang saat ini masih berada di angka 6,23% (BPS, 2019), dengan berfokus pada peningkatan *Skill, Knowledge, and Attitude* dari

para calon TKK di Kementerian PUPR tersebut.

Sejak Tahun 2015 – 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai-Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) sudah melatih lebih dari 640.000 TKK dari seluruh Indonesia. Adapun Isu Strategis terkait Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) terdiri dari:

1. Masih Rendahnya Tingkat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK); dan
2. Masih Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).

Menyikapi Isu Strategis utama tersebut, fokus pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu pada Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Arah kebijakan dan strategi peningkatan produktivitas dan daya saing dalam RPJMN 2020-2024 salah satunya adalah penyelarasan kurikulum dunia pendidikan berbasis kerjasama dengan dunia industri (*Link and Match*).

Pada tataran teknis, terdapat beberapa perangkat regulasi yang telah dikeluarkan, antara lain:

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR No. 479/SPIA/Ks/2019 tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Konstruksi di Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Akademik yang masih berlaku hingga tahun 2024;
2. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 59/SE/Dk/2022 tentang Perubahan atas SE No. 129/SE/Dk/2020 tentang Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan dan Calon Lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi; serta
3. SE Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemagangan bagi Calon Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Kementerian PUPR.

Secara khusus, SE Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemagangan bagi Calon Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Kementerian PUPR dibuat guna menjawab salah satu dari 7 (Tujuh) strategi pembangunan infrastruktur, yaitu: Strategi peningkatan kompetensi SDM dengan melalui sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dan beragam program magang yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan. Namun demikian, dalam perjalanannya hingga saat ini belum terlaksana beberapa ketentuan-

ketentuan yang tercantum di dalam SE tersebut, antara lain:

1. Belum tersedianya Database Informasi Proyek Pekerjaan Konstruksi sebagai Program Pemagangan di Kementerian PUPR;
2. Belum tersalurkannya Mahasiswa lulusan / calon lulusan Perguruan Tinggi hasil Kegiatan Link & Match Pelatihan & Uji Sertifikasi SDM Vokasional Bidang Konstruksi dalam Program Pemagangan pada Proyek Pekerjaan Konstruksi; serta

3. Belum terlaksananya Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Program Pemagangan pada Pekerjaan Konstruksi.

Kendala tersebut muncul sebagai akibat dari antara lain reorganisasi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR pada akhir tahun 2019 sehingga belum terlaksananya kegiatan percontohan (*pilot project*) yang difasilitasi oleh Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kerjasama

PROVINSI SUMATERA SELATAN (1 Paket Pekerjaan)			
Pekerjaan Konstruksi	:	Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro Segmen Hilir dan Sungai Sekanak Segmen Ilir Barat Kota Palembang	
Unit Kerja	:	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII	
Nilai Kontrak	:	Rp. 77.586.136.337,-	
Penyedia Jasa	:	Kontraktor Pelaksana PT. Duta Permata Lestari	
Perguruan Tinggi Mitra	:	Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta
		- Universitas Sriwijaya	6 (Enam) Peserta
PROVINSI LAMPUNG (2 Paket Pekerjaan)			
Pekerjaan Konstruksi	:	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Muli)• Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Rajabasa)	
Unit Kerja	:	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung	
Nilai Kontrak	:	<ul style="list-style-type: none">• Rp. 68.901.658.100,- (Pantai Muli)• Rp. 65.315.862.700,- (Pantai Rajabasa)	
Penyedia Jasa	:	<ul style="list-style-type: none">• Kontraktor PT. Mina Fajar Abadi (Pantai Muli)• Kontraktor PT. SAC Nusantara (Pantai Rajabasa)	
Perguruan Tinggi Mitra	:	Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta
		- Universitas Lampung	4 (Empat) Peserta
		- Institut Teknologi Sumatera	4 (Empat) Peserta
		- Universitas Bandar Lampung	4 (Empat) Peserta
PROVINSI JAMBI (1 Paket Pekerjaan)			
Pekerjaan Konstruksi	:	Preservasi Jalan Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi - Sp. Tiga Batara Gas Plant (Pematang Lumut) - Kuala Tungkal dan Jalan Dalam Kota Kuala Tungkal	
Unit Kerja	:	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi	
Nilai Kontrak	:	Rp. 71.839.523.481,-	
Penyedia Jasa	:	Kontraktor PT. Abun Sendi	
Perguruan Tinggi Mitra	:	Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta
		- Universitas Jambi	3 (Tiga) Peserta
		- Universitas Batanghari Jambi	3 (Tiga) Peserta

Gambar 18. Informasi Umum Pilot Project Pemagangan Jasa Konstruksi PUPR

maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai yang memiliki tugas pengawasan dan pemberdayaan di bidang pembinaan jasa konstruksi. Kondisi tersebut diperburuk dengan datangnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan adanya refocussing anggaran, terbatasnya kegiatan sosial dalam masyarakat akibat diberlakukannya kebijakan *Physical Distancing* dan *Work from Home* (WFH), termasuk pada kantor-kantor Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Implementasi program Magang Konstruksi PUPR pada wilayah kerja BJKW II Palembang ini, dilakukan dalam rangkaian kegiatan dengan berbagai tahapan pelaksanaan, yaitu:

1. Identifikasi Awal Lokasi Paket Pekerjaan Konstruksi sebagai Usulan Pilot Project Pemagangan Jasa Konstruksi;
2. Rapat Koordinasi kepada stakeholders (Balai Teknis dan Perguruan Tinggi) di Provinsi Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan;
3. Penetapan Usulan Paket dan Tersedianya Database Informasi Program Pemagangan di Kementerian PUPR;
4. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemagangan Jasa Konstruksi kepada seluruh stakeholders;
5. Penyerahan Bahan Informasi/Media Sosialisasi Kegiatan

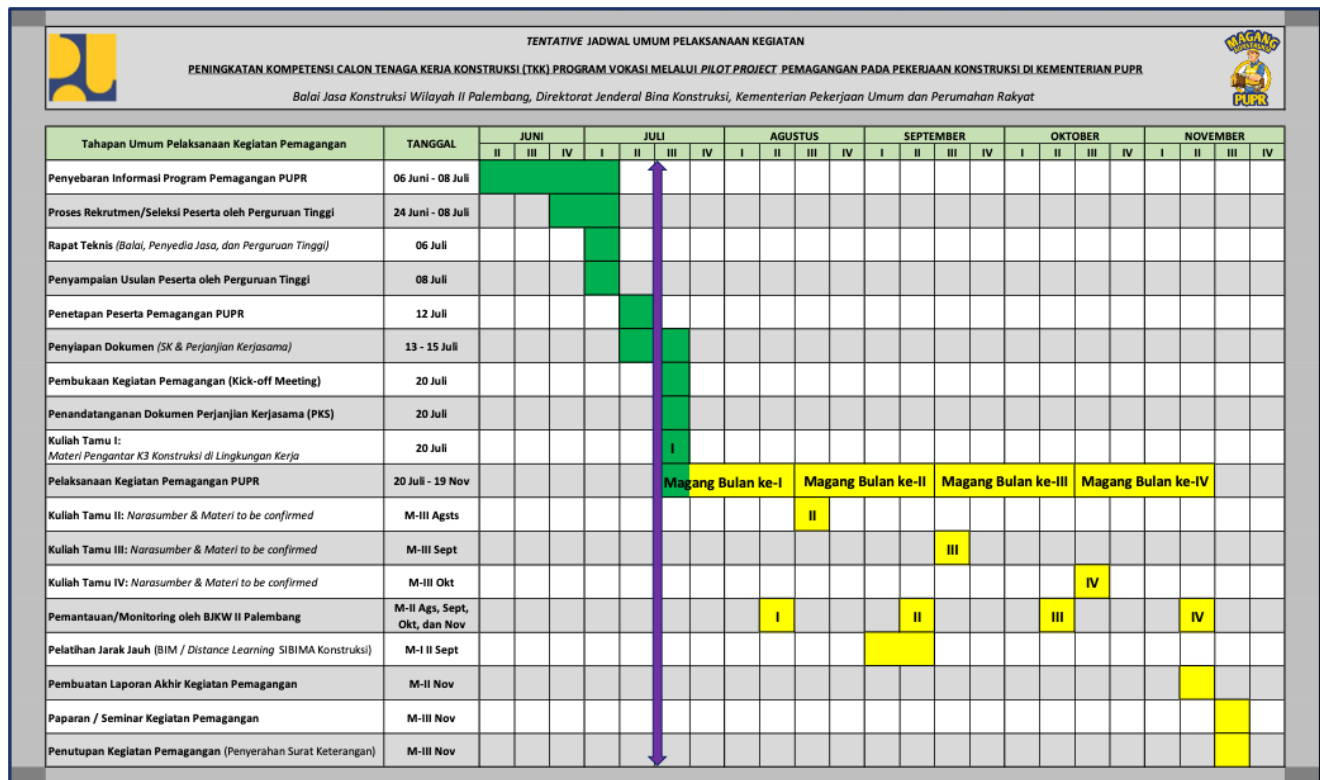
Pemagangan Jasa Konstruksi;

6. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rencana Teknis Kegiatan Pemagangan Jasa Konstruksi;
7. Usulan Peserta Kegiatan Pemagangan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR oleh Perguruan Tinggi;
8. Penetapan Peserta Kegiatan Pemagangan Jasa Konstruksi;
9. Pembukaan Kegiatan Pemagangan Jasa Konstruksi PUPR (*Kick-off Meeting*); dan
10. Penandatanganan Dokumen Administrasi Magang Konstruksi PUPR (PKS, SK, dll).

Adapun data teknis paket-paket pekerjaan konstruksi yang memenuhi kriteria pemagangan jasa konstruksi dapat dilihat pada **Gambar 19**. Informasi Umum Pilot Project Pemagangan Jasa Konstruksi PUPR.

Paket pekerjaan maupun Perguruan Tinggi yang akan berpartisipasi dalam *Pilot Project* tersebut kemudian divalidasi melalui koordinasi/kunjungan ke lapangan kepada Balai Teknis yang terkait dan Perguruan Tinggi pengusul. Hal ini guna memastikan bahwa Balai-Balai teknis selaku penanggungjawab paket-paket pekerjaan konstruksi tersebut bersama Badan





Gambar 19. Rencana Kerja Pilot Project Pemagangan Jasa Konstruksi PUPR

Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang terkontrak dapat memfasilitasi program pemagangan tersebut, serta Perguruan Tinggi dapat mengusulkan calon peserta/mahasiswa yang tertarik atau berminat untuk mengikuti program pemagangan tersebut.

Tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting-nya adalah Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rencana Teknis Kegiatan Magang Konstruksi PUPR. Manfaat dari tahapan kegiatan ini adalah sebagai bahan penyusunan program kegiatan selama pemagangan oleh para *stakeholders* terutama dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Jasa Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Calon Dosen Pembimbing terkait. Hasil dari kegiatan FGD ini adalah tersusunnya program kegiatan di pemagangan yang berkaitan erat dengan mata kuliah (Konversi ke beberapa Kredit Semester/SKS atau Mata Kuliah tertentu dari Perguruan Tinggi), sehingga dapat disusun suatu program pemagangan yang terukur.

Pembukaan secara resmi Kegiatan Magang Konstruksi PUPR dan Penandatanganan seluruh SK, PKS dan Surat Perjanjian Pemagangan telah dilangsungkan pada Hari Rabu, 20 Juli 2022

pukul 08:00 – 12:00 WIB secara *offline* dan serentak di 3 (Tiga) lokasi yaitu:

- Kantor BBWS Sumatera VIII, Ditjen Sumber Daya Air;
- Kantor BBWS Mesuji Sekampung, Ditjen Sumber Daya Air;
- Kantor BPJN Jambi, Ditjen Bina Marga;

Kegiatan ini bertujuan sebagai *Kick-off Meeting* atau Pertemuan Perdana yang melibatkan seluruh *stakeholders* yang telah mendukung terlaksananya kegiatan (Balai Teknis, BJKW, Perguruan Tinggi, Peserta, Dosen Pembimbing, dan BUJK), juga sebagai sarana peningkatan pemahaman dan dukungan dari seluruh pihak terkait program ini. Kegiatan ini secara *virtual* resmi dibuka oleh Bapak Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, S.E., M.Si. selaku Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dalam kapasitasnya mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

RENCANA DAN TINDAK LANJUT KE DEPAN

1. Penyusunan Bahan Masukan Revisi SE Menteri PUPR No. 23/2019

Dengan selesainya kegiatan *Pilot Project* Magang Konstruksi PUPR ini, diharapkan BJKW II Palembang akan

memiliki bahan-bahan evaluasi pelaksanaan sebagai data primer bagi penyempurnaan Surat Edaran Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemagangan bagi Calon Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan diharapkan regulasi yang baru tersebut agar dapat *in-line* dengan regulasi lain yang terkait dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah (Peraturan Presiden No. 12/2021 maupun Peraturan Kepala LKPP No. 12/2021).

1. Perluasan Kerjasama/PKS dengan Perguruan Tinggi
Dalam tahap selanjutnya, sejalan dengan Revisi SE Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019, kegiatan pemagangan ini dapat diperluas cakupannya dengan melibatkan lebih banyak lagi Proyek Konstruksi di Kementerian PUPR dan tidak hanya untuk penempatan di BUJK Kontraktor Pelaksana, namun juga di Konsultan Supervisi, maupun juga sebagai Staf Pelaksana di PPK Pelaksana Kegiatan. Selain itu, *lesson learned* dari *Pilot Project* ini dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas lagi agar dapat menjangkau seluruh Perguruan Tinggi mitra dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang. Pada akhirnya, capaian *output* pemagangan dapat secara signifikan berkontribusi bagi pemenuhan gap Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang kompeten dan memiliki pengalaman lapangan di Kementerian PUPR.
2. Implementasi dari Perjanjian Kerjasama (PKS) di BJKW I-VII
Dengan adanya penyempurnaan dari SE Menteri PUPR No. 23/SE/M/2019, diharapkan terjadinya peningkatan peran dan kewenangan dari para *stakeholders* terkait pemagangan ini, terutama peran dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberdayaan di bidang pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pencantuman jumlah peserta yang difasilitasi melalui program pemagangan jasa konstruksi di dalam Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) mulai TA 2023-2024.
3. Tersedianya Pola Penganggaran yang Baku bagi Kegiatan Pemagangan
Tersedianya pola kegiatan maupun pola penganggaran terkait kegiatan pemagangan yang secara rutin dianggarkan dalam DIPA dalam setiap Tahun Anggaran di seluruh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan isu terkait pembinaan dalam bentuk Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) program

VOKASI dalam bentuk *Pilot Project* Pemagangan Jasa Konstruksi sangat berpotensi untuk dijadikan program unggulan (*branding*) di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR karena Kegiatan pemagangan konstruksi di Kementerian PUPR merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh para *stakeholders*, terutama mitra Perguruan Tinggi karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jasa konstruksi secara umum maupun secara khusus bagi para peserta-nya;

Perlu disiapkan perangkat regulasi yang komprehensif dengan tingkat pengaturan yang lebih tinggi dari SE Menteri PUPR karena kegiatan ini melibatkan banyak *stakeholders* dan telah dimulai sejak tahap awal Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terutama pada bagian pembiayaan bagi peserta. Oleh karena itu, diharapkan regulasi yang baru tersebut dapat selaras/*in-line* dengan pengaturan PBJ tersebut, misalnya komitmen pembiayaan terkait peserta pemagangan ini diatur menjadi persyaratan yang dinilai/dipertandingkan dalam evaluasi Dokumen PBJ oleh Pokja dan menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan dalam pengendalian Kontrak oleh PPK, sehingga ke depannya peran dari BJKW sebagai fasilitator dapat secara bertahap dikurangi karena program tersebut telah berjalan lancar di lapangan tanpa intervensi dari BJKW;

Lesson learned / dokumentasi (administrasi maupun *audio-visual*) dari pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi bahan sosialisasi/promosi lanjutan kepada seluruh mitra kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga dapat membangkitkan *awareness*/kesadaran dari semua pihak akan pentingnya program ini; Setelah pelaksanaan *Pilot Project* selesai dan bahan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara komprehensif didapatkan, BJKW II Palembang akan memberikan bahan informasi/masukan secara tertulis kepada Direktorat terkait (Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi) terkait area perbaikan, antara lain:

- a. Pemilihan lokasi Paket Pekerjaan Konstruksi berdasarkan nilai pekerjaan (> 50 Milyar Rupiah) perlu disesuaikan lebih lanjut agar dapat tersedia program pemagangan yang dapat diakses oleh setiap daerah di Indonesia;
- b. Peningkatan peran dari para *stakeholders*, terutama kewenangan dari Balai Teknis (yang membawahi BUJK Kontraktor/Konsultan) dan Perguruan Tinggi (yang membawahi Peserta Mahasiswa) harus ditingkatkan agar dukungan terkait penyelenggaraan pemagangan secara aktif dapat diberikan.

Sumber: www.beritasatu.com

Prevention Through Design (PTD) Upaya Besar Untuk Mengurangi Kecelakaan Konstruksi Sejak Proses Desain/Perencanaan

Penulis:
Aji Hafid Laksana, ST MT

Jika *skylight* dirancang dan dipasang dengan pelindung yang tepat, kematian dan cedera pada pekerja yang secara tidak sengaja jatuh melalui *skylight* selama kegiatan konstruksi dan pemeliharaan dapat dicegah. Itulah kenapa diperlukan perencanaan yang baik dalam setiap aktivitas konstruksi untuk mengurangi kecelakaan konstruksi. Upaya untuk mengurangi kecelakaan konstruksi ini sangat bisa dilakukan sejak proses desain/perencanaan. Untuk itulah kami memperkenalkan konsep *Prevention through design* (PTD).

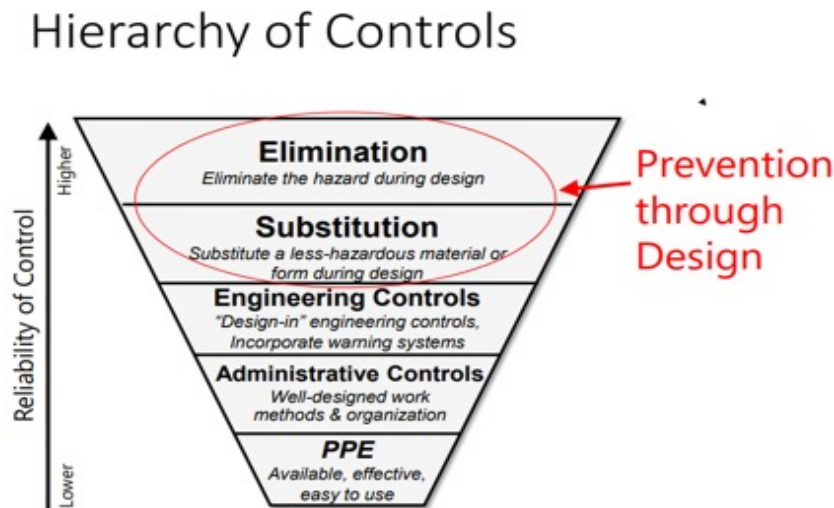
Pembangunan yang berkelanjutan yang disebut *Triple Bottom Line* "Semua bisnis dapat dan harus membantu masyarakat mencapai tiga tujuan yang saling terkait – kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial." *Prevention through Design* yang biasa disebut *Design for Safety* atau *Safety by Design* merupakan target pembangunan dalam tiga pilar pembangunan (*Triple Bottom Line*) yang berkelanjutan terutama dalam hal keadilan sosial. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan Meningkatkan *Safety Site*

membutuhkan desain dan konstruksi yang terintegrasi.

Dampak Desain dan konstruksi yang secara tidak “adil”, tidak hanya mempengaruhi orang yang terlibat dalam proyek namun juga mempengaruhi orang-orang yang tidak hadir (berperan)

kecelakaan, Peningkatan keselamatan operasi/pemeliharaan. Pada hierarki kontrol dalam pencegahan kecelakaan konstruksi PTD dilaksanakan saat Kontrol eliminasi dan substitusi. seperti pada **Gambar 20. Hierarchy of Control**.

Hambatan Implementasi PTD antara lain Kurangnya pendidikan



Gambar 20. Hierarchy of Control

dalam proses pembangunan. Bagaimana kami meyakinkan semua pemangku kepentingan bahwa proyek kami tidak akan berdampak tidak adil kepada orang-orang yang tidak hadir selama pengembangan konsep, desain, dan perencanaan konstruksi. Bagaimana dampak terhadap Penghuni gedung, Penduduk sekitar, Politisi dan regulator lokal, Karyawan kami, Pekerja konstruksi, Pekerja pemeliharaan.

Berdasarkan <http://www.cdc.gov/niosh/topics/ptd/> *Prevention through Design* (PTD) adalah Mengatasi kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses desain untuk mencegah atau meminimalkan bahaya dan risiko terkait pekerjaan yang terkait dengan konstruksi, manufaktur, penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan fasilitas, material, dan peralatan. Contoh PTD adalah Secara eksplisit mempertimbangkan keselamatan konstruksi dan pemeliharaan dalam desain proyek, menyadari dan menghargai keselamatan pekerja konstruksi dan pemeliharaan saat melakukan tugas desain, membuat keputusan desain sebagian didasarkan pada risiko keselamatan yang melekat pada elemen desain bagi pekerja konstruksi dan pemeliharaan.

Manfaat Ekonomi penerapan PTD antara lain : Berkurangnya bahaya di lokasi, Lebih sedikit cedera dan kematian pekerja, Berkurangnya premi kompensasi pekerja, Peningkatan produktivitas dan kualitas, Lebih sedikit penundaan akibat

dan pelatihan perancang sehubungan dengan: keselamatan dan kesehatan pekerja konstruksi, sarana dan metode lokasi konstruksi, dampak fitur desain terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, dan desain alternatif yang tidak terlalu berbahaya untuk dibangun. Pemisahan kontrak desain dan konstruksi yang menghambat komunikasi awal dan tepat waktu dari konstruktor kepada perancang tentang potensi bahaya keselamatan yang terkait dengan desain. Sementara Pendorong Implementasi PTD diantaranya Penggunaan metode pengiriman proyek yang mengintegrasikan keahlian konstruksi dan desain pada proyek. Ketersediaan dan penggunaan alat visualisasi desain/konstruksi seperti 4D-CAD dan *Building Information Modelling*. Integrasi pengetahuan konstruksi dalam ruang lingkup desain dan selama fase desain. *Prevention through design* (PTD) saat ini dan kedepan akan sangat bermanfaat jika kita terapkan dalam mengurangi kecelakaan konstruksi. Dengan perkembangan *Building Information Modelling*, visualisasi dan automasi keniscayaan kedepan konsep ini harus difahami dan sama-sama kita terapkan untuk mencegah kecelakaan konstruksi.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Kementerian PUPR Siapkan SDM Konstruksi Kompeten di Bidang BIM dan Geospasial Melalui Kolaborasi dengan Trimble Navigation Singapore PTE. LTD.

Penulis:
Indri Eka Lestari
Staf Komunikasi Publik Setdijen Bina Konstruksi

Infrastruktur merupakan katalisator yang berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing. Penguatan terhadap pondasi pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur terus diwujudkan Pemerintah Indonesia, seperti yang saat ini sedang gencar dilakukan yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun dengan konsep Kota Pintar (Smart City) Berbasis Hutan.

Dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) dan implementasi kolaborasi teknologi dibidang konstruksi, maka pembangunan Ibu Kota Negara perlu didorong dengan pemanfaatan Building Information Modelling (BIM) dalam mempermudah koordinasi, integrasi, efisiensi, dan pengendalian pelaksanaan konstruksi.

Building Information Modelling (BIM) bukan semata-mata

aplikasi atau pengoperasian komputer, tetapi representasi digital dari karakteristik fisik dan karakter fungsional dari suatu bangunan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN, perlu dibekali dengan kompetensi di bidang BIM melalui pemodelan digital.

“Pemanfaatan teknologi BIM serta kesiapan Sumber Daya Manusia dalam pengoperasian perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) merupakan dua hal yang harus berjalan sinergi dan berkelanjutan”, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap I Bendungan Sepaku Semoi, Sabtu (27/8) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya mendorong peningkatan kompetensi di bidang Building Information Modelling salah satunya melalui kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders termasuk diantaranya vendor penyedia layanan software di bidang Building Information Modelling (BIM).

Kegiatan BIM Innovation Conference yang dilaksanakan secara hybrid pada 24 November 2022 di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu agendanya adalah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Trimble Navigation Singapore Pte. Ltd.

Sebelumnya telah dilaksanakan MoU antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan PT. Trimble Solution SEA Pte. Ltd di Bendungan Sepaku Semoi pada tanggal 27 Agustus 2022 lalu. “Dari MoU tersebut, kita akan mencetak 500 orang Instruktur dan melatih 1500 orang dari Aparatur Sipil Negara dan calon

tenaga kerja konstruksi, dan juga pemanfaatan secara gratis 450 Lisensi Trimble Structures dan Trimble Connect untuk mencetak Ahli BIM ke depan. Hingga saat ini, dengan kerja sama antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) dengan Trimble, telah dilaksanakan pelatihan BIM instruktur dengan total 64 peserta dan pelatihan BIM dengan total 1866 peserta. Hal ini karena antusias calon Tenaga Kerja Konstruksi dan akademisi terhadap implementasi BIM ke depan”, Kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Trimble Navigation Singapore Pte. Ltd. ini merupakan kerja sama lanjutan dalam penyelenggaraan pelatihan dengan pemanfaatan teknologi dan peralatan Geospasial, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait BIM yang lebih komprehensif.

“Melalui program-program yang dirancang pada Perjanjian Kerjasama ini, diharapkan pelatihan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran, memberikan manfaat bagi para stakeholders, dan dapat diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Yang lebih penting lagi adalah dapat menumbuhkan BIM Awareness kepada setiap peserta sehingga tercipta BIM Environment yang baik dan berkelanjutan”, ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembukaan BIM Innovation Conference, Kamis (24/11).

Selain itu pada BIM Innovation Conference, akan dilakukan knowledge sharing mengenai implementasi teknologi BIM pada proyek riil oleh PT. PP (Persero) Tbk, diikuti oleh presentasi produk Trimble, Live Demo, serta Hands On alat-alat berteknologi Mixed Reality dan Augmented Reality dari Trimble.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Menko Marves : Kurangi Penggunaan Material Konstruksi Import, dan Prioritaskan Produk Dalam Negeri untuk Pulihkan Ekonomi Bangsa

Penulis:
Indri Eka Lestari
Staf Komunikasi Publik Setdijten Bina Konstruksi

Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, sebagai upaya menciptakan multiplier effect, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, serta membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi. Selain itu pembangunan infrastruktur menjadi modal bangsa Indonesia meningkat menjadi negara maju dan tidak lagi terperangkap sebagai

negara berkembang saja atau middle income trap.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh pasokan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Untuk itu, pengelolaan tata kelola rantai pasok material dan peralatan konstruksi harus dilakukan dengan baik, untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas.

“Saya ingatkan kembali instruksi Bapak Presiden agar kita mengurangi penggunaan bahan material konstruksi impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi dalam negeri atau produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri. Sebab Pembangunan infrastruktur harus memberikan nilai tambah, mendorong industrialisasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta belanja yang efisien”, demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2022, Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2022, dan Beton Indonesia 2022, Rabu (23/11) di Jakarta.

Produksi Dalam Negeri (PDN) betul-betul menjadi perhatian yang serius. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau walaupun dari luar, harus punya pabrik di dalam. Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Amanat Presiden RI agar pemerintah membelanjakan minimal Rp 400 Triliun dari anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PDN dan produk pelaku UKM-Koperasi.

Kewajiban penggunaan PDN harus diimbangi dengan gerak cepat para pengusaha lokal untuk terus berinovasi dalam menciptakan substitusi material dan komponen peralatan konstruksi impor. Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan proyek di lapangan, memiliki kualitas produk yang bisa bersaing dengan produk impor, bahkan harus sesuai dengan standar pasar global, serta memberikan harga yang kompetitif dengan barang produk impor.

“Saat ini telah terjadi shifting pola belanja barang dan jasa dari offline ke online, dengan kenaikan trafik internet berkisar 15-20%. Hal ini menjadi momentum untuk akselerasi transformasi digital. Dukungan dan kerjasama dalam membangun UMKM dan industri anak bangsa berbasis teknologi memasuki era Industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Saya mengajak kita semua turut andil memajukan UMKM dan industri digital di sektor jasa konstruksi”, tegas Menteri Basuki

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengembangkan dan mendorong pemanfaatan katalog elektronik sebagai etalase bagi pengusaha lokal dan UMK-koperasi untuk memajang produknya sehingga mudah mengakses belanja pemerintah.

“Saya berharap rangkaian kegiatan KI, IIW dan BI 2022 yang mengambil tema ‘Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa’ ini dapat melahirkan terobosan baru dalam membangun infrastruktur, bangunan, serta hunian yang lebih berkualitas dan terjangkau. Untuk itu manfaatkan acara ini untuk saling berinteraksi dan menginspirasi untuk meningkatkan kapasitas dalam membangun infrastruktur di Indonesia”, tutur Menteri Basuki.

Disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, acara ini diselenggarakan sebagai hasil kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), dan berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 23 sampai 25 November 2022 di Jl Expo Kemayoran.

Pelaksanaan Konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Week, dan Beton Indonesia 2022 dikemas dalam bentuk (1) Pameran, (2) Konferensi, (3) Dialog pengadaan, dan (4) Anugerah Konstruksi Indonesia, yang diikuti oleh pemerintah, para pengusaha dari dalam dan luar negeri. Kegiatan pameran diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) exhibitor, dimana 60 (enam puluh) exhibitor berasal dari dalam negeri, dan 15 (lima belas) exhibitor berasal dari luar negeri, termasuk diantaranya adalah para pelaku usaha yang telah terdaftar dalam e-katalog sektoral Kementerian PUPR.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins CMG, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M.*



Sumber: Antara/Anggoro

Pembangunan Infrastruktur Di Era Milenial

Penulis:

Yosaphat Bisma Wikantyasa

Sub Koordinator Pelaksana Tugas Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Selama lima tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya di wilayah yang sudah berkembang, lokus pembangunan juga dilakukan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Ragam infrastruktur yang telah dibangun. Mulai dari jalan, jembatan, bendungan, perumahan, penyediaan air minum, sanitasi, irigasi, dan sarana prasarana lainnya. Bahkan, pembangunan tersebut terus dilanjutkan di periode

pemerintahan Joko Widodo selama lima tahun mendatang hingga 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyatakan, kalangan milenial perlu mengetahui pentingnya sektor infrastruktur dalam mempersatukan dan meningkatkan aktivitas perekonomian di Indonesia. Menurutnya, membangun infrastruktur adalah mengelola harapan masyarakat yang tinggi untuk memperoleh layanan infrastruktur yang lebih lengkap dan berkualitas.



Pada tahun 2022, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran Rp100,59 triliun, atau hanya 57 persen dari anggaran yang diajukan Rp176 triliun. Pada tahun 2021, pagu akhir Kemen PUPR sebesar Rp152,1 triliun dan realisasinya mencapai Rp143,5 triliun. Dengan anggaran sebanyak itu diharapkan pembangunan Infrastruktur tersebut dapat berdampak dengan baik terutama untuk kalangan Milenial yang dekat dengan literasi digital. Seperti kita ketahui Literasi Digital ini sangat penting bagi ter selenggaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan dimana semua teknologi pangan dan pertanian semua sudah menggunakan konsep *smart farming*. Dengan adanya Pertanian modern yang dikelola oleh para Milenial tersebut akan memudahkan kehidupan Manusia modern dimasa depan dengan demikian Infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemerintah dalam Hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat menjadi sebuah momentum penting untuk melanjutkan kemakmuran Indonesia dengan mandiri pangan.

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan Infrastruktur ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak adanya interkoneksi antara teknologi canggih dengan teknologi pangan yang maju, sehingga didapatkan sebuah hubungan yang dinamis antara distribusi hasil tanaman pangan dengan kelancaran mendapatkan bahan pangan tersebut yang diperoleh melalui pembangunan infrastruktur yang baik dan maju.

Milenial dalam hal ini menjadi penentu keberhasilan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Pola pikir cerdas yang tertanam sejak dini dibarengi dengan usaha pangan yang berteknologi cerdas dapat mendongkrak

perekonomian Indonesia karena sudah didukung dengan adanya pembangunan Jalan, jembatan, Bandara, Pelabuhan yang menghubungkan moda transportasi darat laut dan udara sehingga memudahkan jalur distribusi perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang.

Penting pula bagi para generasi milenial untuk memahami pembangunan tersebut tidak semata hanya fisik saja namun juga dibarengi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.

Generasi milenial erat kaitannya dengan masyarakat 5.0, Mengutip dari laman resmi CAO Japan, masyarakat 5.0 atau *society 5.0* adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Contohnya *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari berbagai konsep yang ada sebelumnya. Mulai dari *Society 1.0* di mana manusia berada di era berburu dan mengenal tulisan. Kemudian *Society 2.0* yang merupakan era pertanian, di mana masyarakat sudah mulai bercocok tanam. *Society 3.0* yang sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah memanfaatkan mesin untuk membantu aktivitas. Serta *Society 4.0* atau revolusi industri 4.0, di mana manusia sudah mengenal teknologi komputer hingga



internet. Kini, *Society 5.0* hadir dengan mengusung konsep bahwa semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Artinya, internet tidak hanya berguna untuk berbagi informasi dan menganalisis data, melainkan juga untuk menjalani kehidupan. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara peran manusia (masyarakat) dan pemanfaatan teknologi.

Paduan harmonis antara manusia dan teknologi tentu saja akan membawa perubahan besar-besaran dalam tatanan perekonomian masyarakat Indonesia, dengan adanya fenomena ini sudah pasti meningkatkan pula kebutuhan masyarakat akan segala kebutuhan hidup yang semakin dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Dengan adanya teknologi tersebut sudah tidak ada lagi Batasan-batasan dan sekat daerah atau bahkan Negara. Semua barang kebutuhan dapat kita peroleh dengan penggunaan teknologi informasi. Dapat kita bayangkan bilamana tidak ada inovasi-inovasi dari kalangan milenial tersebut, betapa banyak pengangguran di Indonesia diakibatkan adanya era disrupsi tersebut.

Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Di era ini, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis sebaiknya menyusun strategi baru yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi di era disrupsi. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisnis yang ditekuni mampu bersaing dengan pendatang-pendatang baru yang telah lebih dulu menggunakan teknologi canggih. Sebab, tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat tidak berinovasi dan menemukan strategi bisnis yang lebih kreatif.

Pengusaha sebaiknya mulai aktif mempelajari dan melakukan pembaharuan-pembaharuan terkait teknologi.

Kemampuan bersaing dengan teknologi canggih ini akan merubah paradigma lama yang sulit untuk bertahan di era *Artificial Intelligence*. Ketika semua sudah diprogram sedemikian rupa sehingga kecerdasan buatan tersebut seakan mengetahui apa saja kebutuhan manusia pada saat ini. Seperti halnya cendekawan, *Artificial Intelligence* dapat mengetahui relasi apa saja dalam kebutuhan kita sehari-hari. Ketika kita sedang berselancar pada media sosial mencari *property* rumah yang sesuai dengan penghasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, maka akan muncul pula pada laman media sosial lainnya seakan-akan mereka mengerti sekali kebutuhan anda dalam mencari *property* yang tepat sesuai dengan pekerjaan dan pendapatan kita sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Teknologi bukan untuk dihindari melainkan untuk dipelajari, maksud dari pernyataan tersebut adalah jawaban atas sebuah kondisi dimana manusia harus secara terus-menerus belajar dengan segala perubahan yang terjadi, terutama teknologi yang memang harus kita pelajari setiap hari sampai kita bisa menguasai teknologi bukan 'dikuasai teknologi'. Selaras dengan perkembangan teknologi tersebut Pemerintah terus mendukung generasi milenial untuk dapat mempelajari transformasi digital sedini mungkin bahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat disarankan bagi pelaksana Pendidikan memberikan kurikulum Pendidikan digital pada bangku sekolah dasar.

Pembangunan Infrastruktur merupakan sokongan percepatan

dan pemanfaatan transformasi digital secara nasional, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memberikan pemerataan Infrastruktur untuk mengejar target transformasi digital Nasional. Pemetaan dilakukan dimulai dari darat, laut dan udara untuk menunjukkan kesiapan Indonesia mengadopsi digitalisasi secara massif. Banyak yang sudah dilakukan di Indonesia mulai dari pembangunan jaringan tulang punggung yang didarat dan didasar laut, pembangunan *middle mile* berupa *microwave link* dan *fiber link*. Termasuk dua satelit besar yaitu satelit berkapasitas 300 Gbps dan pembangunan *Base Transceiver Station* yang merata diseluruh wilayah tanah air termasuk diantaranya wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal.

Menurut Menteri KOMINFO Jhony G Plate, Pemerintah melalui kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan dalam hal infrastruktur digital dalam tiga lapisan diseluruh Nusantara. Pada lapisan *backbone* atau jaringan tulang punggung, Indonesia memiliki jaringan serat optik dengan total Panjang 459,111 kilometer dan 12.399 kilometer serat optik. Pembangunan itu menyediakan akses internet bagi 150.000 fasilitas umum yang terdiri dari 93.000 sekolah, 47.900 gedung pemerintahan, 3.370 fasilitas Kesehatan umum dan 3900 fasilitas keamanan publik.

Dengan kesiapan infrastruktur baik fisik maupun digital merupakan sinergi yang harmonis dari kedua kementerian yang tentu saja dapat melahirkan generasi milenial yang sungguh melek digital dan ekonomi. Sektor Pertanian dan peternakan dengan konsep *smart farming* yang didukung infrastruktur fisik terkoneksi dengan baik tentu saja menjadi letupan besar pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Kejayaan Indonesia dapat diyakini menjadi sebuah poros baru pertumbuhan ekonomi Dunia. Bukan hanya imajinasi semata namun kembalinya kejayaan Nusantara ini memang sudah sangat dipersiapkan dengan matang oleh Pemerintah pada saat ini, dengan dirancangnya Ibukota Negara Baru di Kalimantan dapat menjadi cermin masa depan yang akan kita bangun mulai hari ini.

IKN Nusantara diproyeksikan akan menjadi milestone untuk

mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Letak geografis IKN Nusantara yang berada tepat di tengah bentang kepulauan Nusantara, maka IKN Nusantara akan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi nasional. Layaknya tubuh manusia, IKN Nusantara berlaku sebagai pusat saraf yang menghadirkan inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau. Kota Balikpapan sebagai otot yang menjadi simpul hilir migas dan logistik Kalimantan Timur. Sedangkan Kota Samarinda sebagai jantung yang menjadi pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Unit kegiatan ekonomi hijau akan dibangun di IKN Nusantara seperti Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) serta inovasi, pusat pendidikan abad ke-21, pusat *Industry 5.0* dan *smart city*, dan pusat-pusat lainnya (ekowisata, pariwisata kota, bisnis, serta medis dan kebugaran). Konsep superhub dalam pengembangan IKN Nusantara dapat mengubah wajah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif. Saat ini terdapat infrastruktur *existing* yang dapat menunjang mobilisasi aliran sumber daya antar pusat yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Trans Kalimantan, Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan, Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang Samarinda.

Dengan adanya pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat mempersiapkan generasi milenial Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana Pembangunan Infrastruktur dengan mengusung konsep pusat *industry 5.0* dan *smart city* tersebut dapat menjadi pendulum kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan. Tentu saja sebagai generasi milenial tidaklah mudah menjalankan semua cita-cita mulia pendiri bangsa Indonesia, kita dituntut untuk lebih memikirkan kesejahteraan bangsa dan memajukan Negeri Indonesia dengan selalu melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan dapat terus melahirkan Inovasi-Inovasi terbaru dengan menggunakan segala sumber daya energi yang terbarukan, sehingga Bumi selalu hijau dan terjaga sepanjang Masa. Pembangunan yang berdasarkan prinsip *Zero Waste* harus terus dilaksanakan demi terciptanya Indonesia yang sehat, unggul dan berdaya saing. (Bis)



Sumber: www.freepik.com

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli

Penulis:
Juli Simangunsong

Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, hal tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan tenaga kerja konstruksi ahli nasional. Konsultan berperan penting terhadap pengendalian kualitas pekerjaan konstruksi dan keberhasilan pembangunan sehingga perlu diberikan imbalan jasa yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas output pekerjaannya. Berbicara pada tataran implementasi, terdapat beberapa permasalahan di lapangan, baik yang menggunakan APBN maupun APBD. Bahkan masih ada pemerintah daerah yang tidak menerapkan remunerasi minimal dengan

alasan keterbatasan anggaran, beberapa daerah ada yang menganut Undang-Undang Keuangan Daerah sehingga yang menentukan Harga Satuan adalah Kepala Daerah.

Jika dilihat berdasarkan Pasal 43 UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pemilihan penyedia jasa konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, harus memperhatikan standar remunerasi minimal dan standar remunerasi dimaksud ditetapkan oleh Menteri. Masalah lain yang tentu saja sangat signifikan dampaknya bagi pengembangan profesionalitas

Tenaga Ahli adalah bahwa kenaikan besaran remunerasi tidak berbanding lurus dengan kenaikan *take home pay* yang diterima tenaga ahli. Pengembangan kualitas sumber daya merupakan prasyarat atau landasan agar kesuksesan pembangunan infrastruktur dapat tercapai.

Berdasarkan data pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 42.927 Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana mayoritas merupakan konsultan Perencana Rekayasa sebanyak 36,2%, lalu 31,4% Pengawas Rekayasa, 14,1% Konsultan Arsitektur, kemudian masing-masing 7,7 dan 6,8% Perencanaan Penataan Ruang dan Konsultansi Lainnya. Sementara Konsultan Spesialis sebesar 3% dan sisanya adalah Konsultan Pengawasan Arsitektur dan Pengawasan Penataan Ruang masing-masing 0,2%. Kualitas sumber daya manusia sendiri sangat tergantung dari aspek upah, keterampilan, pengalaman, profesionalisme dan motivasi. Sejauh mana dampak dari kemampuan yang dimiliki tenaga ahli terhadap kesiapan SDM yang profesional dipengaruhi oleh besarnya *Take home pay* yang diterima. Tentu nilai *take home pay* yang diterima Tenaga Ahli berpengaruh besar terhadap profesionalisme dan motivasi kerjanya yang berujung pada kualitas *output* pekerjaan Jasa konsultansi. Pengawasan Penerapan Remunerasi tentu menjadi tantangan paling besar dalam upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, sesungguhnya pengaturan terkait remunerasi mengikat terhadap seluruh pekerjaan jasa konsultansi mulai dari jasa konsultansi yang menggunakan dana APBN, APBD, BUMN/BUMD, hingga dana swasta, namun praktek di lapangan masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 mengatur besaran Remunerasi paling rendah yang dapat diberikan kepada badan usaha jasa konsultansi konstruksi, sehingga pengguna jasa dapat memperhitungkan remunerasi yang lebih besar sepanjang berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, namun pengaturan pada Kepmen ini terbatas hanya untuk remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional, sehingga jika terkait dengan remunerasi tenaga ahli asing besaran remunerasi pada HPS menjadi berbeda-beda sehingga diindikasikan sebagai kemahalan.

Terdapat 4 (empat) *point* perubahan Pada Revisi Kepmen PUPR terkait remunerasi ini, yaitu, Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Jenjang Jabatan Ahli dalam rangka Seleksi Nasional, Besaran Remunerasi Minimal Tenaga

Kerja Konstruksi Asing Jenjang Jabatan Ahli dalam rangka seleksi Nasional atau Internasional, Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Jenjang Jabatan Ahli dalam Rangka Seleksi Internasional, dan Pengaturan Persentase Upah Pokok (THP) Minimal yang diberikan Badan Usaha kepada Tenaga Ahli Nasional.

Remunerasi Tenaga Ahli dihitung berdasarkan rumus empiris dengan menggunakan indikator sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berupa besaran *Gross Domestic Bruto* (GDP) dan Jumlah Penduduk serta memasukkan variabel jenjang Pendidikan dan Tahun Pengalaman Personil. Khusus untuk Tenaga Ahli Nasional dalam rangka seleksi Internasional, selain menggunakan besaran GDP, Jumlah Penduduk, Pendidikan serta Pengalaman Personil, perhitungan besaran Remunerasi memasukkan rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*).

Pengaturan Persentase Upah Pokok (*Take Home Pay*) minimal tenaga ahli pada Kepmen PUPR 524 Tahun 2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Konsultasi Konstruksi merupakan salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR untuk peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli, yang sebelumnya belum diatur pada Kepmen Nomor 897/KPTS/M/2017. Untuk tenaga ahli tetap, upah pokok yang dibayarkan adalah minimal 30% (tiga puluh persen) dari besaran remunerasi minimal, sementara untuk tenaga ahli tidak tetap ditentukan sebesar minimal 50% (lima puluh persen). Dengan penentuan besaran upah pokok ini diharapkan linier dengan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli.

Perubahan signifikan pada Kepmen PUPR 524/KPTS/M/2022 tentu tidak serta merta menyelesaikan permasalahan penerapan remunerasi minimal di lapangan, muncul beberapa pertanyaan sekaligus menjadi tantangan Kementerian PUPR untuk memformulasikan kebijakan efektif berikutnya. Pertanyaan paling sering muncul adalah bagaimana mekanisme pengawasan penerapan standar remunerasi, misalnya, bagaimana memastikan bahwa upah pokok yang dibayarkan oleh Badan Usaha kepada tenaga ahli telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmen ini. Formula pengawasan yang efektif tentu sangat dibutuhkan, mengingat besaran remunerasi pada Kepmen ini sudah mendekati kondisi

ideal yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga ahli yang berujung pada peningkatan kualitas *output* pekerjaan jasa konsultansi, namun tanpa pengawasan yang serius maka hasil pekerjaan jasa konsultansi berpotensi mengecewakan pengguna jasa.

Pemerintah juga memegang peranan penting untuk menangkap potensi-potensi unggul dari Universitas untuk dapat berkarir sebagai Tenaga Ahli Konstruksi, jangan sampai profesi sebagai tenaga ahli konstruksi tidak menarik bagi lulusan Teknik Sipil, Arsitektur, Geodesi, Teknik lingkungan dan jurusan Teknik lainnya yang sebenarnya sangat potensial berkarir di jasa konsultansi konstruksi. Salah satu dampak pengawasan sebagaimana dimaksud diatas adalah bahwa menjadi Tenaga Ahli Konstruksi menjadi salah satu profesi yang menarik bagi angkatan kerja yang sesungguhnya sangat kita butuhkan dalam siklus pekerjaan infrastruktur di Tanah Air.

Pertanyaan berikutnya terkait penerapan remunerasi minimal yang tak kalah pentingnya adalah Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi. Pasal 93 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa setiap pengguna jasa yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis

dan/atau denda administratif. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan *professional* tenaga kerja konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal. Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP 22 Tahun 2020 ini belum didetailkan sehingga menjadi kurang impelentatif di lapangan.

Tentu masih ada beberapa isu lain yang seharusnya segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR sehubungan dengan remunerasi tenaga ahli ini, namun yang sangat urgent untuk segera diformulasikan adalah mekanisme pengawasan dan pengenaan sanksi bagi pengguna dan penyedia jasa yang tidak memperhatikan besaran remunerasi minimal yang telah ditentukan dalam Kempen 524 Tahun 2022 ini. Menurut hemat kami 2 (dua) isu besar ini dapat segera ditindaklanjuti melalui revisi Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.



Sumber: kemkes.go.id

Mengejawantahkan *Spiritual Calling* Bagi ASN: Regulasi, Tantangan, serta Implementasi Oleh Analis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Negara

Penulis:
Abdur Rahman S.

Ada satu fenomena yang menarik. Biasanya pegawai yang sudah lama bekerja di satu pekerjaan akan merasa ahli dalam pekerjaannya. Mereka adalah ahlinya dan orang lain yang baru masuk bukanlah siapa-siapa yang bisa banyak bertanya atau mengkritik (terkecuali KONSULTAN). Mereka akan gerah dan sangat gerah jika ada pegawai baru dan banyak bertanya tentang apa yang harus dikerjakan serta mengapa melakukan suatu pekerjaan seperti itu. Pegawai lama akan menghindari pertanyaan pegawai baru

dengan menjawab, "Lakukan saja! Dari awal memang sudah begitu prosesnya!"

Pegawai lama akan melakukan pekerjaan mereka dengan senang hati dari hari ke hari tanpa perubahan atau sikap kritis terhadap apa yang mereka kerjakan. Kehadiran pegawai baru membuat suasana emosi pegawai lama cukup terganggu. Sebagai pegawai baru tentu mereka berusaha belajar dan berusaha mempelajari semua praktik dalam pekerjaan sehari-

hari yang baru mereka kenali dan akan segera menjadi pekerjaan mereka berikutnya.

Tatkala kita kaji secara komprehensif, eksistensi dan kesadaran pegawai terhadap kehadiran *spiritual calling* (kesadaran spiritual) merupakan hal yang tidak bisa dinafikan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan entitas dari tubuh, pikiran, dan spiritual dalam menjalankan berbagai peran yang disandangnya, termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 69 ayat 2, menjelaskan tentang pengembangan karier ASN dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Lebih lanjut Pasal 69 ayat 4 mengartikulasikan bahwa integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ada pun Pasal 69 ayat 5 mengartikulasikan bahwa moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Setiap calon PNS tatkala diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Hal ini terdapat dalam peraturan Pasal 6 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja, pengucapan sumpah pegawai dengan akan mengiringi kepada wilayah spiritual tidak terbatas tatkala mengucapkan sumpah/janji saat diangkat menjadi PNS.

Berkaitan dengan hal ini, beberapa pakar menjelaskan Jabeen, dkk (2014:45) mengartikulasikan bahwa "organisasi yang percaya terhadap konsep spiritualitas di tempat kerja meyakini bahwa para pegawai tidak hanya memiliki kebutuhan ekstrinsik tetapi juga kebutuhan intrinsik. Budaya spiritual benar-benar menyadari bahwa manusia memiliki sekaligus pikiran dan jiwa (*spirit*), jadi pegawai perlu mengetahui makna dan tujuan mereka bekerja. Para pegawai tidak ingin diasingkan bahkan merasa perlu dihubungkan pada individu lainnya dan menjadi bagian dari komunitas yang ada."

Dalam praktiknya, persepsi para pakar mengenai hakikat *spiritual calling* tidak serupa. Bahkan diantara mereka terdapat perbedaan persepsi mengenai kaitan antara religi dan spiritual. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan latar belakang pemikiran serta perspektif masing-masing. Namun, hendaknya perbedaan ini bisa menjadi khazanah yang memperluas cakrawala dan cara berpikir kita.

"*Spiritual calling* mencakup perjumpaan spiritual terhadap Tuhan. *Spiritual Calling* merupakan pengalaman-obyektif seseorang di dalam dirinya, suatu komunikasi yang tidak mudah dijelaskan baik terhadap panca indera maupun terhadap logika" (Zimmer, 1994:26). Banaga (2000:23) mengelaborasi bahwa spiritualitas berbeda dengan agama. Agama adalah kodifikasi, institusionalisasi, dan formalisasi terhadap spiritualitas. Menurutnya, spiritualitas menjadi agama ketika ia berubah menjadi sistem kepercayaan (kredo), jalan hidup, dan tata cara beribadah. Mengukur spritualitas sebagai konstruk yang terpisah dari agama adalah upaya yang tidak mudah.

Dalam buku *Faith at Work Scale* (FWS) dijelaskan bahwa ada lima gatra (dimensi) yang dianggap mewakili motivasi dan pemaknaan bekerja sebagai panggilan transendental (*spiritual calling*). Kelima dimensi tersebut ialah Pertama, memandang pekerjaan sebagai bentuk kemitraan (*partnership*) dengan Tuhan. Kedua, memandang pekerjaan sebagai panggilan dari Tuhan. Ketiga, saya melihat keterhubungan antara ibadah yang kulakukan dengan pekerjaan yang kulaksanakan. Keempat, saya memandang pekerjaanku sebagai rencana Tuhan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kelima, saya bekerja dengan semaksimal mungkin karena keimanan".

Bagi seorang pegawai atau ASN, tidak sedikit faedah *spiritual calling* yang diperoleh, seperti pegawai merasa telah berbuat kebaikan dan ibadah melalui pekerjaan yang dilakukannya. Keuntungan bagi masyarakat adalah mendapatkan pelayanan yang optimal dan sepenuh hati dari pegawai. Ada pun keuntungan bagi organisasi adalah membantu tercapainya visi dan misi yang ditetapkan serta reputasi organisasi di mata publik.

Keberagamaan atau spiritualitas seseorang dapat memberikan keseimbangan emosional untuk para pegawai negeri. Hal ini membantu memberdayakan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan strategis guna mewujudkan kebaikan bersama dan menghindari motif-motif pribadi (*self-interest motives*).

Keuntungan dari kesadaran spiritual ini juga mampu meningkatkan kesehatan pegawai, melesatkan keterlibatan pada pekerjaan, memacu kepuasan kerja, melecutkan komitmen organisasi yang lebih tinggi, lebih mempunyai identifikasi organisasi, meningkatkan kinerja satuan unit, mengurangi tingkat stress, dan berkurangnya frustrasi organisasional. Para pegawai yang bekerja dengan berdasar panggilan spiritual, pekerjaan bukanlah tujuan utama, dan karenanya orang yang

termotivasi secara spiritual dapat berkomitmen terhadap organisasinya yang menyediakan konteks/ruang untuk memenuhi panggilan spiritualnya, terlepas apakah pekerjaan yang ada memuaskan atau pun tidak memuaskan.

Pada kenyataannya, menerapkan spiritual calling tidaklah semudah seperti menjentikkan jari. Terdapat sejumlah tantangan yang menghadang dalam konteks membumikan panggilan spiritual ini. Untuk itu, kita perlu mengidentifikasi tantangan-tantangan ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadapinya. Tantangan pertama ialah belum dianggap pentingnya *spiritual calling*, baik oleh organisasi maupun oleh individu/pegawai. Hal ini dimungkinkan karena panggilan spiritual bersifat *intangible* (tidak bisa dilihat secara kasatmata) serta dianggap tidak berkaitan langsung dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian upaya melesatkan *spiritual calling* nampaknya belum menjadi program prioritas, baik oleh pegawai maupun oleh organisasi. Padahal, bak akar pada sebuah pohon, seorang pegawai yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi merupakan aset yang tak ternilai bagi organisasi.

Para pegawai umumnya menyadari bahwa bekerja merupakan ibadah dan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam konteks *spiritual calling*, tantangan kedua adalah terdapatnya 'jurang' dan diskrepansi antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat pegawai saat bekerja. Sebagian pegawai masih baru sebatas lisan dan belum bisa

mengaplikasikan panggilan spiritual secara nyata dalam bekerja keras untuk kepentingan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, hendaknya disparitas antara *das sein* (kondisi yang eksis saat ini) dan *das sollen* (kondisi yang ideal) ini bisa terus dijembatani.

Tantangan ketiga dalam konteks mengoptimalkan spiritual calling adalah masih kurangnya peran organisasi dalam menumbuhkembangkan *spiritual calling* ini. Sebagian organisasi memang telah mengambil langkah nyata, antara lain dengan memberikan pelatihan *Emotional Spiritual Quotient* dan sejenisnya pada para pegawai. Namun demikian, pelatihan seperti ini seharusnya dirancang, dirumuskan, dan diberikan secara sistematis serta terencana, bukan sekadar program hit and run. Hal ini agar pelatihan tidak sekadar menyentuh tingkat kognitif pegawai, namun juga diupayakan agar mampu menggerakkan kesadaran dan perilaku nyata.

Saat menghadapi tantangan-tantangan dalam "menerapkan" *spiritual calling*, selayaknya kita mengambil langkah-langkah konkret nan sederhana meskipun terkesan remeh. Kita mulai dengan diri sendiri, seperti menyadari bahwa ada relevansi antara ibadah yang masing-masing kita lakukan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Memandang pekerjaan yang kita lakukan sebagai rencana-Nya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ini sesuai dengan adagium Cina-klasik bahwa muhibah ribuan mil dimulai dengan satu langkah perdana....



Sumber: goodnewsfromindonesia.id

Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Sulawesi

Penulis:

Isabella Laras Anindy, S.Ikom

Staf Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi

Sulawesi atau yang dikenal masyarakat dunia dengan nama “Celebes” merupakan pulau terbesar keempat di Negara Indonesia. Pulau ini memiliki luas sekitar 174.600 km² dengan total penduduk mencapai 20 juta jiwa. Luas pulau yang Sulawesi memiliki enam provinsi yang sudah terdaftar dan diakui secara nasional yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Secara astronomi, Pulau Sulawesi terletak di 2°08' LU serta 170°17' BT. Puncak tertinggi Pulau Sulawesi yaitu Gunung Rantemario dengan ketinggian mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Sebagai wilayah

utara Indonesia, Sulawesi berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan di Timur, Pulau Maluku di Barat, Negara Filipina di Utara dan Pulau NTT dan NTB di Selatan.

Pulau yang menyerupai bentuk huruf K ini mempunyai posisi yang strategis dimana berada di tengah - tengah negara Indonesia. Permukaan daratan yang bergunung - gunung menyebabkan adanya jarak yang jauh antara semenanjung - semenanjung yang ada di Sulawesi, hal ini menyebabkan transportasi laut lebih banyak dipilih karena lebih mudah menjangkau melalui laut daripada melalui jalan darat yang

bergunung - gunung. Penggunaan kapal - kapal di Sulawesi menjadi transportasi yang banyak digunakan sehingga banyak dari penduduk Sulawesi bermata pencaharian sebagai pembuat kapal bahkan Pulau Sulawesi dikenal sebagai pembuat kapal Pinisi tradisional yang mendunia. Terdapat tiga teluk yang membagi semenanjung di Sulawesi, yaitu, Teluk Tolo, Teluk Bone dan Teluk Tomini yang memisahkan Semenanjung Minahasa atau Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Tenggara dan Semenanjung Selatan. Pulau Sulawesi memiliki selat yang membentang di sepanjang sisi baratnya.

Ada sangat banyak cerita mengenai nama Sulawesi itu sendiri, salah satu cerita yang banyak dibicarakan yaitu yang disampaikan oleh sejarawan sosiolog yang berasal dari Manado bernama F.S. Watuseke. Diambil dari artikel makalah *"On the Name Celebes"*, F.S. Watuseke menulis bahwa nama "Sulawesi" berasal dari gabungan dua kosakata dalam dialek Sulawesi Tengah yaitu "Sula" atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pulau dan "Wesi" yang dalam arti Indonesia berarti besi atau salah satu kandungan mineral. Kata Besi diambil karena kandungan besi yang cukup tinggi di sekitar Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur. Sebelumnya, nama "Celebes" disematkan Bangsa Portugis kepada Pulau Sulawesi secara keseluruhan sekitar abad 14-15 masehi. Rombongan Bangsa Portugis datang ke Pulau Sulawesi untuk berburu rempah, dan bertanya kepada penduduk setempat yang sedang membuat perahu mengenai nama tempat tersebut. Adanya perbedaan bahasa membuat penduduk asli mengira - ngira apa yang sedang ditanyakan, untuk itu penduduk menjawab dengan "Sele'bessi" dalam bahasa Sulawesi, yang berarti engsel besi. Penduduk asli Sulawesi mengira pertanyaan itu berbunyi, apa yang sedang kalian pegang, sehingga penduduk setempat menjawabnya dengan engsel besi. Sejak saat itu Bangsa Portugis mengenal pulau tersebut dengan nama "Celebes".

Gotong Royong sebagai Nilai Utama Tradisi Masyarakat Sulawesi

Sulawesi memiliki beragam suku asli di dalamnya, diantaranya yaitu Suku Bugis yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, Suku Toraja yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, Suku Mandar di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Suku Makassar di wilayah pesisir selatan Pulau Sulawesi, Suku Minahasa di wilayah Sulawesi Utara, Suku Talaud yang tersebar di Kepulauan Sangir Sulawesi Utara. Suku - suku tersebut merupakan suku - suku terbesar yang mendiami Pulau Sulawesi,

selain itu ada suku - suku lain yang juga turut mendiami Sulawesi, diantaranya, Suku Duri, Suku Kaili, Suku Mongondow, Suku Gorontalo, Suku Pamona, Suku Mori, Suku Banggai, Suku Saluan, dan Suku Balantak. Keberagaman suku di Sulawesi tidak mengarahkan pada permusuhan atau bahkan perpecahan. Hal ini dikarenakan kehidupan sosial masyarakat Sulawesi didasari oleh nilai - nilai kebersamaan dan persatuan. Adanya rasa persaudaraan yang tinggi dipupuk melalui berbagai tradisi yang didasari oleh nilai gotong royong. Adapun tradisi - tradisi masyarakat Sulawesi yang menekankan nilai gotong royong dimana poin inti dari tradisi yaitu mempererat kekerabatan masyarakat.

Gotong Royong dalam pengertian KBBI berarti bekerja bersama - sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Penerapan gotong royong dalam masyarakat dilakukan secara sukarela guna meringankan beban anggota yang membutuhkan. Nilai inilah yang menjadi nilai utama dalam berbagai tradisi di Sulawesi dan bahkan nilai gotong royong menjadi salah satu slogan di beberapa daerah di Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki slogan dalam Bahasa Kaili yang berbunyi "Nosarara Nosabatutu", yang memiliki arti "Bersama Kita Satu" berbeda halnya dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggunakan Bahasa Buton yang berbunyi "Bolimo Karo Somanamo Lipu" yang berarti "Mendahulukan Kepentingan Umum di Atas Kepentingan Pribadi". Hal ini menjadi bukti bahwa nilai Gotong Royong menjadi nilai yang dihidupi dalam masyarakat Sulawesi. Amalan baik ini terus dilestarikan Masyarakat Sulawesi meskipun tantangan globalisasi menjadi tantangan yang tak terelakkan, meskipun demikian kemajuan zaman turut mendorong adanya perluasan informasi terkait tradisi masyarakat Sulawesi misalnya melalui artikel, video maupun foto - foto yang diunggah ke internet. Hal ini sebagai salah satu upaya pengenalan budaya lokal Sulawesi kepada masyarakat domestik hingga mancanegara. Adapun beberapa tradisi yang menerapkan nilai gotong royong dalam kebudayaan masyarakat Sulawesi terangkum dalam penjelasan di bawah ini.

1. Kerjasama Penuh Suku Bugis dalam Pembuatan Kapal Pinisi

Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki tempat tinggal yang letak geografisnya dekat dengan laut. Adanya kondisi tersebut membuat masyarakat sekitar terbiasa untuk hidup dengan mengandalkan kapal, mulai dari pembuatan kapal hingga menjadi pelaut ulung. Hal ini membawa Suku Bugis dikenal sebagai pelaut

handal karena kepiawaiannya membuat kapal serta mengemudikan kapal hingga ke benua lain. Sulawesi Selatan memiliki produk kapal yang diakui dunia sejak abad 15 yang bernama kapal pinisi. Di daerah Makassar tepatnya di Kabupaten Bulukumba menjadi sentra pembuatan kapal pinisi oleh Suku Bugis. Kapal Pinisi merupakan kapal besar khas Indonesia yang dapat mengangkut banyak orang yang didesain untuk menciptakan pengalaman menyeberang dengan rasa nyaman sekaligus mewah. Tidak hanya melayani permintaan di Indonesia saja, melainkan kenamaan Kabupaten Bulukumba dalam pembuatan Kapal Pinisi sudah mencapai tingkat mancanegara. Pada tahun 2017, Kapal Pinisi masuk dalam UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

Pembuatan kapal pinisi tidak dilakukan dengan sembarangan. Suku Bugis berupaya terus mempertahankan nilai tradisi dalam pembuatan kapal, mulai dari pemilihan kayu hingga melayarkan kapal, Suku Bugis akan memilih hari baik menurut kepercayaan mereka. Hari baik ditentukan pada hari kelima atau hari ketujuh dalam bulan yang sedang berjalan. Angka 5 menyimbolkan *naparillimai dalle'na* dalam Bahasa Bugis atau yang berarti 'rezeki sudah di tangan' sedangkan angka 7 melambangkan *natujuangngi* dalam Bahasa Bugis atau yang berarti 'selalu mendapat rezeki'. Pemilihan kayu untuk kapal pinisi tidak dilakukan dengan sembarangan, kayu yang dipakai terdiri dari 4 jenis kayu yaitu Kayu Besi, Kayu Bitti, Kayu Kandole dan Kayu Jati. Sebelum dipotong dan dirangkai, kayu - kayu yang sudah ditebang harus dikeringkan terlebih dahulu melalui proses penjemuran. Pada setiap proses pembuatan kapal pinisi selalu dilakukan pembacaan mantra dan ritual tertentu oleh para pembuat kapal. Pembuatan kapal pinisi membutuhkan waktu tiga sampai dengan enam bulan yang dikerjakan oleh 5 - 10 orang, Suku Bugis mempercayai bahwa jumlah ini dianggap sebagai porsi yang pas dalam proses pembuatan kapal. Masyarakat setempat percaya apabila terlalu banyak orang yang mengerjakan sebuah kapal pinisi maka akan mempengaruhi atau mengurangi nilai seni dari sebuah kapal pinisi yang dibuat. Lima sampai dengan sepuluh orang dalam pembuatan kapal pinisi dianggap dapat memudahkan adanya kerjasama dan gotong royong dalam pembuatan kapal. Masing - masing anggota memiliki perannya masing - masing dalam pembuatan

kapal sehingga hal ini mendorong adanya kerjasama antar anggota untuk dapat menyelesaikan pembuatan kapal dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

1. Tradisi Pindah Rumah Suku Bugis, Marakka Bola

Suku Bugis mempercayai bahwa rumah adat yang sudah dibangun merupakan berkat untuk keluarga yang menempati, maka dari itu ketika berpindah rumah, Suku Bugis akan membawa serta bangunan rumah yang dimiliki. Rumah panggung yang dibangun dengan kayu akan diangkat secara bersama - sama oleh para laki - laki desa dan dibawa pada lokasi yang baru, tradisi ini dinamakan Marakka Bola atau disebut juga Mappalette Bola. Rumah adat Suku Bugis dibangun dengan menggunakan tiang dan balok kayu yang dirangkai tanpa menggunakan paku untuk bangunan rumah panggung yang berbentuk persegi empat memanjang ke belakang. Peletakan tiang bangunan rumah pun bervariasi, ada yang meletakkannya di atas batu dengan memperhatikan keseimbangan bangunan dan ada pula yang menancapkannya ke dalam tanah. Sebelum dilakukan prosesi Marakka Bola, seluruh perabotan rumah tangga harus dikeluarkan terlebih dahulu dan dipindahkan secara tersendiri. Prosesi pemindahan rumah akan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh kepala adat dan dilanjutkan dengan makan makanan ringan khas Sulawesi yang sudah dimasak oleh para perempuan desa. Makanan khas Suku Bugis yang biasa disajikan dalam tradisi ini yaitu Bandang, Barongo dan Suwella yang dilengkapi dengan sajian minuman hangat seperti teh dan kopi.

Setelah proses makan bersama selesai, kepala adat akan mengumpulkan para laki - laki desa untuk mengelilingi bangunan rumah. Kepala adat akan membacakan doa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dalam proses pemindahan bangunan rumah. Aba - aba dalam seluruh prosesi pemindahan bangunan rumah akan diberikan oleh Ketua Adat. Terdapat dua teknik pemindahan rumah yaitu dengan mengangkat bangunan rumah apabila jarak lokasi tidak terlalu jauh atau dengan menggunakan roda yang diletakkan pada bagian bawah rumah apabila jarak lokasi yang baru terlampau jauh. Setelah prosesi pemindahan bangunan rumah selesai, maka tradisi Marakka Bola akan ditutup dengan makan besar bersama. Makanan khas Sulawesi Selatan yang disajikan setelah proses pengangkatan bangunan rumah biasanya berupa Sup Saudara, berbagai jenis masakan ikan bandeng dan

masih banyak lagi. Suku Bugis benar - benar melakukan apa yang dikatakan pepatah yaitu "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" yang memiliki makna bahwa hal - hal yang berat akan dapat dilakukan apabila kita dikelilingi oleh orang - orang yang mau membantu di sekitar kita. Nilai gotong royong menjadi nilai utama yang terus dilestarikan dalam tradisi Marakka Bola dan diwariskan pada anak - cucu Suku Bugis, Sulawesi Selatan.

1. Gotong Royong Masyarakat Minahasa dalam Mapalus

Mapalus diambil dari Bahasa Minahasa yang berarti bekerja sama atau gotong royong. Konsep ini menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Minahasa yang berperan sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bersama masyarakatnya. penerapan Mapalus dalam kehidupan masyarakat Minahasa mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, seperti dalam kegiatan kedukaan misalnya kemalangan atau kematian, kegiatan suka misalnya pesta pernikahan, pesta ulang tahun, serta kegiatan pertanian seperti pembukaan lahan dan masih banyak lagi. Pada saat Mapalus dilakukan baik perempuan maupun laki - laki akan berbagi tugas dalam mengerjakan suatu kegiatan. Salah satu contohnya, pada saat membuka lahan pertanian, seluruh warga akan berkumpul untuk membuka lahan bersama - sama. Para laki - laki dewasa akan bertugas membersihkan semak - semak yang menutupi lahan dan meratakan tanah dengan menggunakan peralatan seadanya seperti cangkul, sekop dan parang. Sisa - sisa rumput yang sudah dibersihkan oleh para laki - laki dewasa akan dikumpulkan dan dirapikan oleh anak laki - laki kemudian akan dibawa untuk memberi makan hewan ternak. Para perempuan bertugas untuk mempersiapkan makanan di tenda - tenda yang sudah didirikan di dekat lahan. Usai membereskan semua pekerjaan, seluruh masyarakat yang hadir akan bersantap bersama pada saat istirahat siang.

Pemahaman akan pentingnya nilai sosial dalam hidup bersama terus dipertahankan hingga saat ini. Bagi masyarakat Minahasa, hal ini diharapkan dapat menjadi warisan kebudayaan yang terus dilestarikan hingga generasi berikutnya. Masyarakat Minahasa mempercayai bahwa terdapat energi yang besar dalam kegiatan Mapalus sehingga hal ini dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat Minahasa dari generasi ke generasi. Gotong royong yang dimaksud dalam Mapalus memiliki cakupan yang cukup luas, tidak terbatas hanya

pada satu bentuk saja. Mapalus dapat diwujudkan dengan memberi bantuan materi seperti barang atau uang atau bantuan immateri seperti tenaga, penghormatan atau penghargaan. Tidak hanya berfokus pada kehidupan sosial, Mapalus juga memiliki tendensi pada nilai ke-Tuhan-an sehingga nilai yang ingin ditekankan oleh masyarakat Minahasa melalui Mapalus yaitu harmonisasi antara hubungan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Adapun lima asas Mapalus yaitu; Asas religiusitas, asas kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, asas kerjasama, serta asas persatuan dan kesatuan. Adanya kelima asas ini menjadikan Mapalus sebagai nilai kehidupan masyarakat Minahasa yang disepakati bersama untuk dapat menciptakan kehidupan yang harmonis secara vertikal maupun horizontal.

2. Mo Padungku, Tradisi Makan Bersama Setelah Panen Raya

Mo Padungku merupakan upacara adat masyarakat Sulawesi Tengah sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen utama masyarakat berupa beras. Tradisi ini berasal dari nenek moyang masyarakat Sulawesi, tepatnya Suku Pamona yang mayoritas berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah. Daerah - daerah di Sulawesi Tengah yang masih melangsungkan tradisi ini yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una - Una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Mo Padungku diambil dari Bahasa Pamona yang berarti sudah rapi atau sudah tuntas. Padungku sendiri memiliki makna tersirat yang berarti sudah di lumbung atau alat pembajak yang sudah dibersihkan dan disimpan di dalam kolong rumah yang dimaknai sebagai usainya rangkaian penanaman padi oleh petani yang selanjutnya disambung dengan mengadakan pesta bersama. Persiapan pesta dilakukan oleh masyarakat desa secara bergotong royong selama seminggu. Langkah pertama yang dilakukan Suku Pamona dalam persiapan perayaan pesta bersama yaitu mencari daun - daun serta bambu untuk proses memasak. Beberapa hari sebelum perayaan dilakukan, para laki - laki di desa akan membangun tenda dari terpal di lapangan desa. Para petani akan mengolah seluruh hasil panen padi pertamanya menjadi makanan khas Sulawesi yaitu Nasi Bambu atau Nasi Bulu pada sehari sebelum tradisi dilakukan. Sementara itu, para perempuan desa akan mempersiapkan berbagai masakan lauk pauk seperti daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Kaum muda akan mempersiapkan tempat acara, panggung dan dekorasi. Pada hari Mo Padungku dilaksanakan makanan

akan dimakan bersama - sama dengan suasana hangat sambil penuh kebahagiaan dan canda. Kegiatan adat ini kemudian akan ditutup dengan tari tarian seperti Tari Dero pada malam harinya.

Berbeda dengan Suku Pamona, Suku Mori di Kabupaten Morowali akan berkunjung ke rumah handai-taulan dan menyantap hidangan yang disajikan di masing - masing rumah termasuk makanan khas Sulawesi yaitu Dinaha atau Nasi Bambu. Tradisi Suku Mori ini tidak tertutup hanya untuk satu desa saja melainkan terbuka untuk warga desa lain guna mempererat persaudaraan antar warga yang merayakan Mo Padungku. Di Kabupaten Tojo Una - Una, Mo Padungku disebut dengan Pra'a atau Mo Raa yang berarti mendarahi. Suku Bare'e dan Ta'a selalu menggunakan darah ayam kampung hitam untuk melumuri benda - benda yang digunakan sebagai permohonan berkat dari Sang "Pue" atau Tuhan Yang Maha Esa. Mo Padungku

atau Mo Raa mengalami pergeseran dalam masyarakat Bare'e dan Ta'a, masyarakat petani di daerah ini mulai meninggalkan padi dan beralih ke tanaman pangan lainnya seperti jagung dan kacang sehingga perayaan Mo Raa dirayakan untuk mengucapkan syukur atas panen jagung dan kacang. Sama seperti Suku Mori, perayaan Mo Raa akan dilakukan dengan berkunjung ke rumah handai-taulan yang merayakan dan menyantap hidangan - hidangan yang sudah disiapkan. Meskipun memiliki bentuk perayaan yang berbeda - beda, Mo Padungku di wilayah Sulawesi Tengah tetap mendasarkan pada nilai kebersamaan dan kerjasama masyarakat. Nilai gotong royong yang dibawa dalam tradisi Mo Padungku tidak hanya terfokus pada hubungan manusia pada sang "Pue" atau Tuhan Yang Maha Kuasa namun juga menekankan nilai syukur atas persaudaraan yang bersatu tanpa sekat dan kasta dalam proses persiapan Mo Padungku.



Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110